

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Bantuan Alat Kesenian Diganti Kegiatan Prioritas
Entitas / Cakupan	: BPK
Sumber / Hal	: Galamedia / Hal.5
Edisi	: Selasa, 16 Oktober 2018

## Bantuan Alat Kesenian Diganti Kegiatan Prioritas

### SOREANG, (GM).-

Kekecewaan yang dialami para kepala desa (kades) atas pembatalan bantuan alat kesenian, diakui oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung. Kepala Disparbud Drs. H. Agus Firman Zaini, M.Si. mengatakan, pembatalan tersebut dilakukan karena sesuai dengan arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai ada kerancuan pada pengelolaan

kegiatan pengadaan alat kesenian untuk desa tersebut.

"BPK memang tidak melarang. Tapi bila dilihat dari segi administrasi pengajuan saat musrenbang, ada beberapa hal yang tidak sesuai saat verifikasi dilakukan. Untuk itu pada perubahan anggaran tahun 2018, kita alihkan pada kegiatan yang lebih prioritas yakni pertunjukan seni budaya," ungkap Agus di Soreang, Senin (15/10).

Menurutnya, kegiatan pertunjukan seni dan budaya akan dilakukan di tingkat desa dan kecamatan dengan tujuan meningkatkan potensi industri kreatif para pelaku seni di wilayah. Dengan nilai anggaran yang signifikan dari tahun sebelumnya, perihal ketelitian penyerapan anggaran menjadi pertimbangan tersendiri bagi Disparbud.

"Kita upayakan dulu untuk mengkomodir potensi para seniman

yang ada di wilayah agar penyerapan lebih efektif, tepat sasaran, dan lebih prioritas. Seni itu 'kan harus bisa dipertunjukkan dan diperkenalkan, maka kita dorong untuk industri kreatifnya dulu," imbuhnya.

Atas pembatalan pengadaan alat kesenian tersebut, pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada para kades yang telah ditetapkan sebagai penerima. Kemudian pihaknya sudah melakukan evaluasi internal mengenai perencanaan program kegiatan prioritas, khususnya kegiatan usulan kewilayahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

### Hati-hati

Sementara di tempat terpisah, Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, S.H., S.Ip., M.Ip. mengimbau kepada seluruh perangkat daerah (PD) agar lebih berhati-hati dan selektif dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun depan. "Kejadian ini jangan sampai terulang lagi. Bukan untuk Disparbud saja, tapi saya imbau kepada seluruh PD supaya lebih selektif menentukan prioritas program yang akan dilaksanakan," pesan bupati.

Selain itu, lanjutnya, dalam mengalokasikan usulan program kegiatan, pemerintah sudah memiliki aplikasi Sistem Manajemen Informasi Daerah untuk Perencanaan (Simcam) sebagai suatu sistem yang akan mendeteksi segala usulan, perencanaan, dan perubahan program kegiatan PD.

"Aplikasi ini harus digunakan sebaik mungkin, supaya PD bisa menyusun program dan kegiatan yang lebih penting secara terintegrasi hingga kecamatan dan desa sebagai pihak yang lebih paham kebutuhan di wilayahnya masing-masing," pungkask bupati. (B.122)\*\*